

**EVALUASI TARIF BUSKOTA DAMRI  
DI KOTA BANDUNG**



**Alpino M. V. Sigalingging**

300.322  
SIG  
e

21481



**FAKULTAS TEKNIK JURUSAN SIPIL  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**BANDUNG**

2001

83866 R/PTS  
06.08.02

## DAFTAR ISI



ABSTRAK.....	i
PRAKATA.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 SISTEM PENTARIFAN DAN PERMASALAHANNYA.....	2
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	3
1.4 BATASAN MASALAH.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 TARIF ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN.....	6
2.1.1 Tarif Seragam.....	7
2.1.2 Tarif Kilometer.....	9
2.1.3 Tarif Zona.....	10
2.2 TINGKAT TARIF.....	11

2.3 BIAYA OPERASI KENDARAAN.....	12
2.3.1 Biaya Tidak Tetap.....	13
2.3.2 Biaya Tetap.....	14
2.3.3 Biaya Tambahan.....	19
2.4 PRODUKSI PELAYANAN ANGKUTAN UMUM.....	20
2.5 BIAYA POKOK PELAYANAN ANGKUTAN UMUM.....	22
2.6 KUALITAS PELAYANAN DAN KEAMANAN.....	25
BAB 3 PERUSAHAAN BUS KOTA DAMRI.....	27
3.1 DATA PERUSAHAAN.....	27
3.2 PELAYANAN.....	29
3.3 BIAYA OPERASI.....	31
3.4 BIAYA OPERASI KENDARAAN.....	32
3.5 JUMLAH PENUMPANG.....	36
3.6 KINERJA DAN STANDAR PELAYANAN.....	40
BAB 4 DATA DAN ANALISIS.....	45
4.1 ALAT PRODUKSI DAN PRODUKSI.....	45
4.2 BIAYA OPERASI DAN PENDAPATAN.....	48
4.3 ANALISIS.....	51
4.4 KINERJA.....	60
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1 KESIMPULAN.....	63
5.2 SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	67

## DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN

%	= persen
ASTEK	= Asuransi Tenaga Kerja
BBM	= Bahan Bakar Minyak
BBN	= Bea Balik Nama
BPS	= Biro Pusat Statistik
BPU-PN	= Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara
BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
DAMRI	= Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia
DLLAJ	= Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kend.	= kendaraan
kir	= pemeriksaan kendaraan
km	= <u>kilometer</u>
km <sup>2</sup>	= kilometer persegi
org	= orang
Organda	= Organisasi Angkutan Darat
overhead	= biaya tambahan
Perum	= Perusahaan Umum
PKB	= Pajak Kendaraan Bermotor
PN	= Perusahaan Negara
pnp.	= penumpang
Rp.	= rupiah

SG	=	Siap Guna
SGO	=	Siap Guna Operasi
SO	=	Siap Operasi
STNK	=	Surat Tanda Nomor Kendaraan
TLNA	=	Tata Laksana Angkutan
UABK	=	Unit Angkutan Bus Kota
UDJ	=	Uang Dinas Jalan
UPT	=	Unit Pelaksana Teknis

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penelitian.....	4
Gambar 3.1 Prosedur Pelaksanaan Kebijakan UPT Bandung [5].....	29
Gambar 3.2 Denah Trayek Bus DAMRI [8].....	31
Gambar 4.3 Armada per Trayek .....	46
Gambar 4.4 Biaya Per-Penumpang.....	52
Gambar 4.5 Grafik Biaya per Penumpang tanpa Biaya Penyusutan pada Berbagai Trayek.....	54
Gambar 4.6 Grafik Biaya per Penumpang tanpa Biaya Penyusutan dan Bunga Modal pada Berbagai Trayek.....	55
Gambar 4.7 Perbandingan Tarif Dasar/km dari Berbagai Trayek.....	57
Gambar 4.6 Perbandingan Tarif per Trayek dengan Tarif Dasar Rp. 38,-/km .....	58
Gambar 4.9 Perbandingan Tarif per Trayek dengan Tarif Dasar Rp. 53,-/km .....	59

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jenis Kendaraan Bus Kota UPT Bandung [10] .....	28
Tabel 3.2	Data Trayek.....	30
Tabel 3.3	Penumpang per Bus per Hari .....	41
Tabel 3.4	Perbandingan Bahan Bakar dan Jarak Tempuh.....	43
Tabel 3.5	Perbandingan Pegawai dengan Bus yang Beroperasi.....	43
Tabel 4.1	Alat Produksi per Trayek.....	46
Tabel 4.2	Alat Produksi per Bulan.....	47
Tabel 4.3	Produksi Penumpang Harian.....	47
Tabel 4.4	Produksi Penumpang per Bulan.....	48
Tabel 4.5	Biaya Operasi Kendaraan.....	49
Tabel 4.6	Pendapatan per Bulan .....	50
Tabel 4.7	Kondisi Armada.....	50
Tabel 4.8	Biaya Operasi Kendaraan dan Biaya per Penumpang.....	51
Tabel 4.9	Penumpang pada Kondisi Break Even Point.....	52
Tabel 4.10	Biaya Operasi Kendaraan dan Biaya per Penumpang tanpa Biaya Penyusutan. ....	53
Tabel 4.11	Jumlah Penumpang Kondisi Break Even Point tanpa Biaya Penyusutan.....	54
Tabel 4.12	Biaya Operasi Kendaraan dan Biaya per Penumpang tanpa Biaya Penyusutan dan Bunga Modal.....	55

Tabel 4.13 Penumpang pada Kondisi Break Even Point tanpa Biaya Penyusutan dan Bunga Modal .....	56
Tabel 4.14 Tarif Dasar per Trayek .....	57
Tabel 4.15 Tarif per Trayek dengan Tarif Dasar Rp.38,-/km.....	58
Tabel 4.16 Tarif per Trayek dengan Tarif Dasar Rp.53,-/km.....	59
Tabel 4.17 Rasio Pegawai.....	62



## DAFTAR LAMPIRAN



Lampiran 1	Permohonan Penyesuaian Tarif Angkutan Bus kota Bandung.....	68
Lampiran 2	Perhitungan Biaya per Penumpang per Trip.....	76
Lampiran 3	Perhitungan Biaya per Penumpang per Trip (Tanpa Biaya Penyusutan).....	83
Lampiran 4	Perhitungan Biaya per Penumpang per Trip (Tanpa Biaya Penyusutan dan Bunga Modal) .....	90
Lampiran 5	Register Pendapatan Perusahaan .....	97
Lampiran 6	Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 20 Tahun 2000.....	106

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Tarif angkutan adalah pendapatan perusahaan angkutan dan sekaligus merupakan biaya bagi pemakai jasa. Perusahaan angkutan menginginkan agar tarif ditetapkan setinggi mungkin, sedangkan pemakai jasa menghendaki supaya tarif ditetapkan serendah mungkin. Perbedaan kedua kepentingan ini menimbulkan persoalan mengenai penentuan batas kewajaran suatu tarif. Batas-batas kewajaran tersebut sangat bergantung pada kepentingan pemakai jasa dan perusahaan angkutan. Dilihat dari kepentingan pemakai jasa, tarif dikatakan wajar selama masih dalam jangkauan daya beli masyarakat. Bagi perusahaan angkutan tarif yang wajar adalah tarif yang dapat menjamin penerimaan yang cukup di atas biaya operasi angkutan.

Situasi moneter yang tidak menentu pada saat ini, harus juga diwaspadai oleh perusahaan angkutan, agar perusahaan tersebut tetap dapat bertahan. Kenaikan harga berbagai komponen sarana angkutan mencapai 100% hingga 400%, sedangkan kenaikan tarif tidak sebesar kenaikan harga komponen tersebut, karena daya beli masyarakat yang

melemah. Ketimpangan ini merupakan suatu permasalahan besar yang dihadapi perusahaan angkutan.

Perum DAMRI, sebagai salah satu perusahaan angkutan milik negara yang cukup besar, harus juga mewapadai kondisi akibat krisis moneter tersebut. Pada kondisi tersebut masyarakat merasa pelayanan yang diberikan menurun, sementara masalah pengadaan suku cadang membutuhkan biaya yang makin besar, yang menyebabkan tarif harus dinaikkan.

## 1.2 SISTEM PENTARIFAN DAN PERMASALAHANNYA

Tarif angkutan adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen atau penumpang untuk menyewa angkutan umum yang dinaikinya. Kombinasi tarif dan alternatif angkutan umum yang dipakai serta jumlah transfer ke angkutan umum lainnya, akan mempengaruhi keputusan penumpang untuk memilih rute mana dan angkutan umum apa untuk mencapai tujuan pergerakan.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 43 tahun 1991, menetapkan tarif berdasarkan pada jarak tempuh, jenis mobil penumpang, dan fasilitas lainnya. Secara umum tarif bus kota lebih rendah dari pada tarif angkutan umum lain dengan kapasitas yang lebih kecil (angkot). Hal ini disebabkan bus kota dapat membawa penumpang lebih banyak dan dikelola oleh perusahaan umum DAMRI yang mendapat subsidi dari pemerintah. Tarif bus kota adalah Rp 21/km dan tarif angkutan umum lain adalah Rp. 51/km. Satuan harga tarif ini kemudian dipakai untuk menyusun tarif untuk masing-masing trayek, dengan kebijaksanaan tarif untuk perjalanan jauh dan dekat sama besar. Tarif tersebut disahkan sesuai Surat Keputusan Walikota Daerah Tingkat II Bandung No. 019 tahun 1991.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa amat sulit menerapkan tarif jauh dekat sama untuk seluruh penumpang, dengan jarak perjalananan yang sangat bervariasi. Adalah hal yang tidak adil bagi para penumpang, apabila mereka melakukan perjalananan dengan

jarak yang sangat pendek, tetapi membayar tarif yang sama dengan penumpang dengan jarak perjalananan yang panjang. Dari interaksi yang ada akhirnya timbul kesepakatan tak tertulis antara pihak penumpang Angkutan Kota dan operator mengenai tarif, yaitu berdasarkan jarak yang ditempuh oleh penumpang secara individual. Sedangkan penumpang buskota membayar ongkos seragam untuk jarak jauh maupun dekat. Meskipun demikian pada prinsipnya mekanisme yang terjadi tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah yang ada.

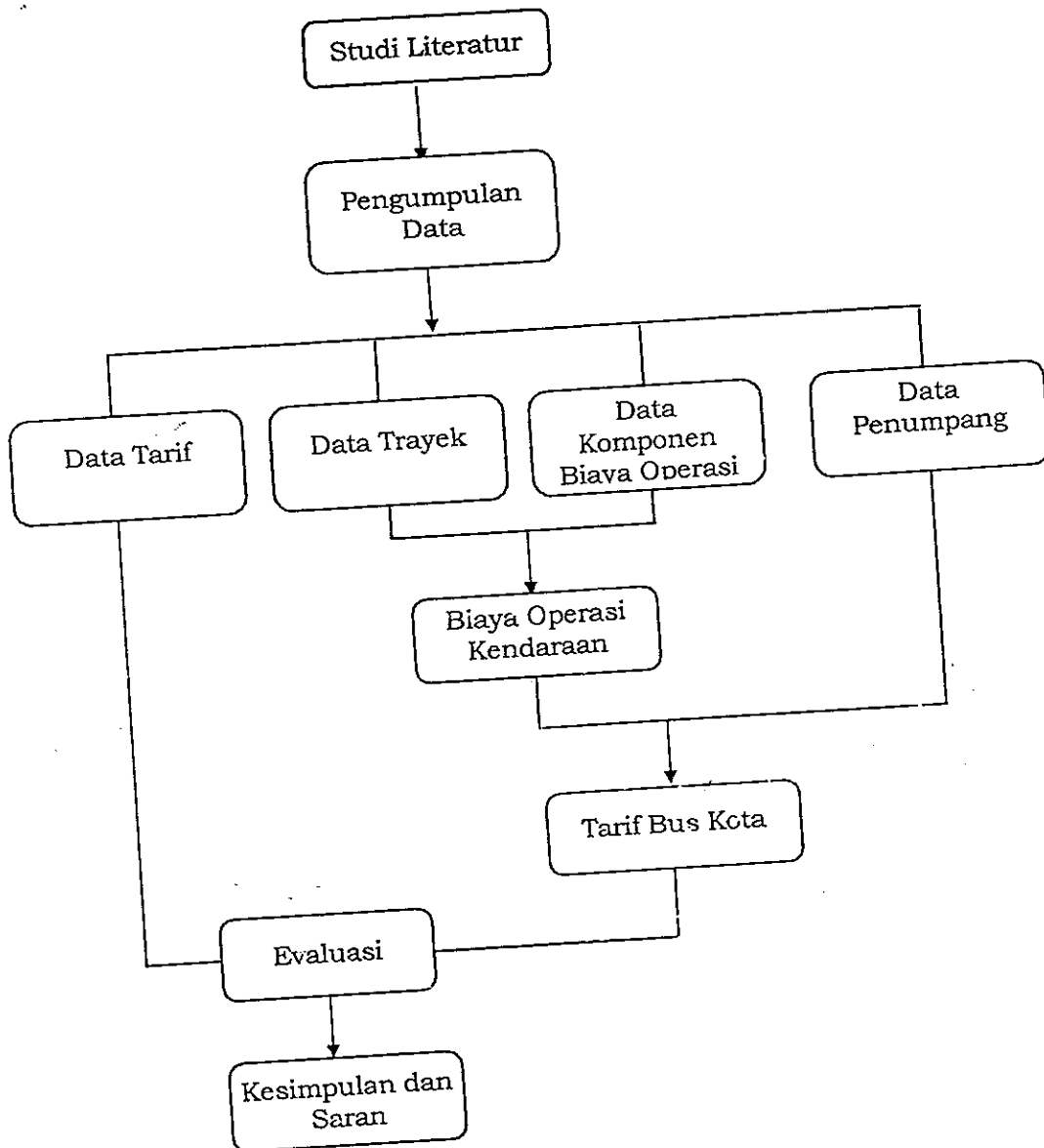
Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan masalah pentarifan juga bersifat politis. Dengan demikian pemerintah tidak dengan mudah dapat menyesuaikan tarif berdasarkan kondisi yang ada secara cepat. Selain itu pengaturan tarif yang ada juga tidak disertai penjelasan yang transparan kepada masyarakat (baik pengelola maupun pengguna jasa) mengenai dasar perhitungannya.

Adanya peraturan pentarifan yang berlaku saat ini menimbulkan pertanyaan, apakah sistem dan tingkat tarif yang berlaku cukup memadai secara finansial, baik bagi operator maupun bagi pengguna (penumpang). Lebih lanjut perlu dipertanyakan pula apakah tarif yang berlaku cukup mampu mengantisipasi biaya operasional perusahaan angkutan, sehingga perusahaan angkutan tersebut dapat tetap beroperasi.

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap tarif angkutan umum bus kota. Tarif yang berlaku saat ini akan ditinjau berdasarkan pendekatan biaya operasi kendaraan, sehingga dapat diketahui apakah tarif yang berlaku saat ini telah memadai atau tidak.

Sebagai studi kasus dipilih Perum DAMRI, yang memberikan pelayanan bus kota di kotamadya Bandung. Hasil yang diperoleh dari studi ini diharapkan dapat digunakan oleh Perum DAMRI dalam menentukan tarif pelayanannya. Bagan alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Bagan Alir Penelitian.

#### 1.4 BATASAN MASALAH

Penelitian ini dibatasi oleh batas-batas geografi, yaitu hanya di dalam batas administrasi kota Bandung. Rute-rute yang dipilih menghubungkan setiap terminal di dalam kota Bandung.

Biaya operasi kendaraan dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, yakni lingkungan (curah hujan, ketinggian), geometrik jalan

(lengkung horizontal, lengkung vertikal, lebar jalan), tipe permukaan (beton aspal, jalan tanah dengan perkerasan, jalan tanah), serta kondisi permukaan (roughness, rut depth). Penelitian ini hanya meneliti biaya aktual dan biaya operasi angkutan bus, dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.